

Melawan Xenofobia

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Citation: Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, *Melawan Xenofobia*, Kedaulatan Rakyat, 2019

Analisis KR Melawan Xenofobia

Dodik Setiawan PhD



INSIDEN Jumat (16/3) di Kota Christchurch menjadi berita utama di banyak negara. Peristiwa penembakan brutal yang menewaskan 49 korban tersebut merupakan suatu pertanda bahwa xenofobia menjadi dasar dari insiden kekerasan yang ditujukan kepada kelompok minoritas.

Xenofobia merupakan suatu prasangka atau kecurigaan yang memunculkan ketidaksukaan atau kebencian terhadap orang atau kelompok yang dianggap asing. Pada sosiologi modern saat ini, gejala xenofobia ditandai dengan adanya perasaan berlebihan (merasa paling tinggi dan suci) terhadap komunitasnya. Yang kemudian memunculkan sikap ketidaksukaan atau kebencian terhadap budaya ataupun kepercayaan yang berlainan dengan apa yang mereka miliki. Prasangka benci ini umumnya dialamatkan pada budaya, kebiasaan, maupun kepercayaan yang dibawa oleh imigran, pengungsi, dan orang asing (*outsiders*). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya xenofobia adalah bentuk negatif dari chauvinisme.

Jika dibiarkan berkembang pada masyarakat modern sikap xenofobia akan menjadi sumber keresahan dan kekacauan

*** Bersambung hal 7 kol 3**

Melawan

di masyarakat. Masyarakat Selandia Baru yang dikenal sebagai masyarakat yang damai, toleran, dan minim tindakan kriminal berubah kondisinya menjadi mencekam saat xenofobia bertransformasi menjadi perilaku kejahatan.

Untuk itu, perlu ada upaya serius dalam memberantas xenofobia. Menurut penulis ada tiga hal penting yang harus diselenggarakan secara efektif dalam mencegah dan menangani perilaku negatif ini. Pertama, edukasi tentang keberagaman. Sangat penting ditanamkan suatu pemahaman yang baik bahwa perbedaan merupakan suatu realitas sosial yang justru membawa dampak positif bagi suatu masyarakat. Keberagaman jika dapat dikelola dengan baik justru akan menciptakan masyarakat yang kuat dan menyejahterakan. Menyatukan perbedaan memang bukanlah hal yang mudah.

Untuk itu diperlukan edukasi yang efektif sehingga dapat membongkar suatu pemahaman bahwa perbedaan itu indah.

Edukasi mengenai keberagaman ini perlu diterapkan sedini mungkin sehingga mampu menumbuhkan rasa damai dan persatuan. Kemudian dapat menangkal kebencian atas latar belakang fisik ataupun non-fisik pada seseorang ataupun kelompok masyarakat. Suasana edukasi di Finlandia yang mengutamakan pada akses pendidikan yang gratis, suasana belajar tanpa batas, serta tidak adanya sistem kasta dalam lapangan pekerjaan menyebabkan rendahnya tingkat kriminalitas dan tingginya toleransi di antara warga masyarakatnya.

Kedua, media dan representasi informasi. Telah banyak studi menunjukkan bahwa informasi yang berkembang di media barat tentang Islam lebih mengarah pada misrepresentasi informasi dan sering menyudutkan Islam. Misrepresentasi informasi tentang Islam menumbuhkan xenofobia dan Islamofobia. Untuk itulah, media sangat berperan untuk menangkal *pseudo information*. Informasi yang disampaikan wa-

jib dilakukan secara utuh dan bukan hanya dari sisi yang menguntungkan pihak tertentu. Keberpihakan media adalah kepada publik. Meskipun media oleh konstitusi diberikan kebebasan, namun bukan berarti kebebasan itu menabrak nilai netralitas, independen, dan kebenaran. Sehingga secara etika media dilarang untuk menciptakan stereotipe dan misrepresentasi informasi khususnya yang berkaitan dengan suku, budaya, ras, dan agama.

Ketiga, penegakan hukum. Hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas xenofobia. Diawali dengan aparat penegak hukum, mereka wajib secara netral dan adil melaksanakan penegakan hukum. Penegak hukum tidak boleh melakukan pelecehan, kekerasan, penangkapan yang sewenang-wenang, dan penegakan hukum yang selektif terhadap orang atau sekumpulan orang yang dianggap asing. Penegakan hukum tidak boleh didasari dengan rasisme atau

xenofobia. Norma hukum yang ada juga harus dapat memberikan efek jera dan membentuk perasaan bersalah bagi setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan.

Xenofobia telah menjadi fenomena global, tidak hanya terjadi di negara barat. Upaya bersama di antara seluruh negara di dunia untuk memerangi xenofobia sangat diperlukan. Xenofobia terjadi karena kegagalan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat menjangkau kelompok dalam kategori *vulnerable* seperti pengungsi, migran, pencari suaka, orang-orang telantar. Sangat dibutuhkan sistem monitoring yang kuat dan efektif baik di tingkat internasional, regional, dan nasional. Dalam rangka membaca, mengukur, dan mengevaluasi upaya negara dalam memenuhi jaminan perlindungan hak asasi manusia.

(Penulis adalah Dosen Tetap
Fakultas Hukum UII dan Direktur Base
for International Law
and ASEAN Law Studies)-f

Melawan Xenofobia

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.

Penembakan brutal yang ditujukan kepada jamaah muslim yang tengah melaksanakan Ibadah Jum'at (KR, 16 Maret 2019) pada dua masjid di Kota Christchurch sontak menjadi tajuk utama di banyak negara. Insiden yang menewaskan 49 korban tersebut merupakan suatu pertanda bahwa xenofobia menjadi dasar dari insiden kekerasan yang ditujukan kepada kelompok minoritas.

Xenofobia merupakan suatu prasangka atau kecurigaan yang memunculkan ketidaksukaan atau kebencian terhadap orang atau kelompok yang dianggap asing. Pada sosiologi modern saat ini, gejala xenofobia ditandai dengan adanya perasaan berlebihan (merasa paling tinggi dan suci) terhadap komunitasnya (*community supremacy*) yang kemudian memunculkan sikap ketidaksukaan atau kebencian terhadap budaya ataupun kepercayaan yang berlainan dengan apa yang mereka miliki. Prasangka benci ini umumnya dialamatkan pada budaya, kebiasaan, maupun kepercayaan yang dibawa oleh imigran, pengungsi, dan orang asing (*outsiders*). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya xenofobia adalah bentuk negatif dari chauvinisme.

Celakanya, sikap xenofobia jika dibiarkan berkembang pada masyarakat modern akan menjadi sumber keresahan dan kekacauan di masyarakat. Masyarakat Selandia Baru yang dikenal sebagai masyarakat yang damai, toleran, dan minim tindakan kriminal berubah kondisinya menjadi mencekam saat xenofobia bertransformasi menjadi perilaku kejahatan.

Untuk itu, perlu ada upaya serius dalam memberantas xenofobia. Penulis mengajukan tiga hal penting yang harus diselenggarakan secara efektif dalam mencegah dan menangani perilaku negatif ini, antara lain: pertama, edukasi tentang keberagaman. Sangat penting ditanamkan suatu pemahaman yang baik bahwa perbedaan merupakan suatu realitas sosial yang justru membawa dampak positif bagi suatu masyarakat. Keberagaman jika dapat dikelola dengan baik justru akan menciptakan masyarakat yang kuat dan menyejahterakan. Menyatukan perbedaan memang bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan edukasi yang efektif sehingga dapat membingkai suatu pemahaman bahwa perbedaan itu indah. Edukasi mengenai keberagaman ini perlu diterapkan sedini mungkin sehingga mampu menumbuhkan rasa damai dan persatuan yang kemudian dapat menangkal kebencian atas latar belakang fisik ataupun non-fisik pada seseorang ataupun kelompok masyarakat. Suasana edukasi di Finlandia yang mengutamakan pada akses pendidikan yang gratis, suasana belajar

tanpa batas, serta tidak adanya sistem kasta dalam lapangan pekerjaan menyebabkan rendahnya tingkat kriminalitas dan tingginya toleransi diantara warga masyarakatnya.

Kedua, media dan representasi informasi. Telah banyak studi menunjukan bahwa informasi yang berkembang di media barat tentang Islam lebih mengarah pada misrepresentasi informasi dan sering menyudutkan Islam. Misrepresentasi informasi tentang Islam menumbuhkan suburkan xenofobia dan Islamfobia. Untuk itulah, media sangat berperan untuk menangkal *pseudo information*. Informasi yang disampaikan wajib dilakukan secara utuh dan bukan hanya dari sisi yang menguntungkan pihak tertentu. Keberpihakan media adalah kepada publik. Meskipun media oleh konstitusi diberikan kebebasan, namun bukan berarti kebebasan itu menabrak nilai netralitas, independen, dan kebenaran. Sehingga secara etika media dilarang untuk menciptakan stereotipe dan misrepresentasi informasi khususnya yang berkaitan dengan suku, budaya, ras, dan agama.

Ketiga, penegakan hukum. Hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas xenofobia. Diawali dengan aparat penegak hukum, mereka wajib secara netral dan adil melaksanakan penegakan hukum. Tidak boleh seorang polisi melakukan pelecehan, kekerasan, penangkapan yang sewenang-wenang, dan penegakan hukum yang selektif terhadap orang atau sekumpulan orang yang dianggap asing. Penegakan hukum tidak boleh didasari dengan rasisme atau xenofobia. Norma hukum yang ada juga harus dapat memberikan efek jera dan membentuk perasaan bersalah bagi setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan yang lahir dari xenofobia.

Xenofobia telah menjadi fenomena global, tidak hanya terjadi di negara barat. Upaya bersama diantara seluruh negara di dunia untuk memerangi xenofobia sangat diperlukan. Xenofobia terjadi karena kegagalan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat menjangkau kelompok dalam kategori *vulnerable* seperti pengungsi, migran, pencari suaka, orang-orang terlantar (*displaced persons*). Sehingga sangat dibutuhkan sistem monitoring yang kuat dan efektif baik di tingkat internasional, regional, dan nasional dalam rangka membaca, mengukur, dan mengevaluasi upaya negara dalam memenuhi jaminan perlindungan hak asasi manusia.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UII dan Direktur Base for International Law and ASEAN Law Studies.